



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI, RABU 18-09-2024



RINGKASAN BERTA HARI INI

13 Sekolah akan Direnovasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo akan menambah jumlah sekolah yang diperbaiki tahun ini. Ada tambahan 13 sekolah yang akan direnovasi.

M Salfud Rohman, Wartawan Radar Sidoarjo

ARTINYA, total sekolah yang diperbaiki mencapai 46. Saat ini, Dispendikbud Sidoarjo sedang memperbaiki 23 SDN dan 10 SMPN.

Beberapa sekolah yang mendapatkan perbaikan tambahan yakni, SDN Gedang di Kecamatan Porong, SDN Sukol 1 di Kecamatan Sidoarjo dan TK Pembina di Kecamatan Sedati.

Kelebihan baru akan dimiliki bulan depan. Adapun pekerjaannya diperkirakan memakan waktu tiga bulan. Dengan demikian proses perbaikan diharapkan selesai pada akhir tahun. "Untuk sekolah yang diperbaiki anggaran keuangan, pelaksanaan pekerjaan fisiknya dimulai dari Oktober hingga Desember," ucapnya, Selasa (17/9).

• Ke Halaman 10



Perwakilan Ormas, Pedagang dan LSM Datangi Kadishub

SIDOARJO - Beberapa orang dari perwakilan pedagang, LSM, Ormas dan media mendatangi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo guna menemui Kadishub Benny Airlangga Selasa (17/9/24) untuk menanyakan dan mencari solusi atas adanya dugaan hurun pedagang dan pembakaran salah satu lapak pedagang di lokasi Terminal Porong.

Sama salah seorang yang menyampaikan keluhan terkait pembakaran lapak pedagang ayang potong rokok, maka pembakaran lapak tersebut apa niatnya, sampai orang kami tidak jualan, padahal disitu ada posko LSM Seven Gab. "Dan kami ingin tahu paguyuban PKL didalam terminal siapa pengelola paguyuban," ujar Sandi.

"Bahkan sempat ada intimidasi dari oknum yang diketahui bernama Pak Yono, Pak Sutris Pak Gareng dan, mengintimidasi pedagang kami. Dan disana ada sebuah iuran (retribusi) ikalau terarah, arahnya kemana? Pengelola uang ini yang besarnya Sabtu Rp 12.000 dan Minggu Rp 5000 dan Selasa Rp 12.000. "Sandi (Arndi) menambahkan, harapan saya menjelang suara teman-teman agar tidak terjadi miss karena hubungan baik dengan jenangan selaku Kadishub," pungkasnya.

Benny Airlangga Yogaswara, SH, MM dikonfirmasi Duta Masyarakat Selasa (17/9/24) diruang kerjanya mengatakan,



Perwakilan pedagang dan beberapa anggota LSM dan Ormas saat ditemui Kadishub Kab.Sidoarjo Benny Airlangga diruang kerjanya Selasa (17/9/24)

Sembako Tak Layak Konsumsi

GRESIK- Penyaluran beras CSR dari PT Smelting kepada warga Desa Roomo, Kecamatan Manyar menjadi polemik. Karena beras yang disalurkan ke warga diduga kurang layak konsumsi.

Untuk itu, pihak pemerintah Kecamatan Manyar memediasi antara Pemerintah Desa Roomo dengan warga, RT, RW dan perwakilan BPD hadir di Kantor Kecamatan Manyar, kemarin.

Camat Manyar Hendriawan Susilo kepada awak media menyampaikan, polemik penyaluran beras dari CSR PT Smelting tersebut timbul karena beras yang disalurkan ke warga diduga kurang layak konsumsi.

"Karena itu, kami sudah instruksikan kepada pemerintah desa agar beras yang sudah disalurkan diganti dengan beras lebih layak sesuai dengan nilai dan spek dari pihak pemberi CSR yang disalurkan," tutur dia.

Pihaknya juga meminta agar Pemesan Roomo menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat secara terbuka.

"Kami juga akan menghimbau kepada pihak swasta atau perusahaan yang memberikan CSR agar kedepannya berupa barang," imbuh dia.

Sedangkan Kepala Desa Roomo Taqwa Zainudin berjanji pihaknya memastikan akan mengganti beras tersebut kepada masyarakat.

Dia menjelaskan PT Smelting memang memberikan CSR kepada Pemerintah Desa berupa uang sebesar Rp 1 miliar. Sebagian digunakan untuk memberikan bantuan sembako kepada masyarakat.

"Yang melaksanakan dan membeli (berasnya) tim pelaksana kegiatan dan perangkat kita. Pasti kita ganti semua," katanya.

Perlu diketahui, total beras yang disalurkan 1.180 paket, per paket 10 kilogram. • Pii

Pelanggaran Netralitas ASN Sudah 400 Kasus

Bawaslu Prediksi Lebih Masif daripada Pilpres

JAKARTA - Menjelang penetapan pasangan calon, pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN) diintensifkan. Sebab, mobilisasi ASN menjadi salah satu potensi pelanggaran yang masif dalam Pilkada 2024.



Kemarin Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri), serta Badan Kepegawaian Negara mengupayakan jajaran kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah berkolaborasi.

pelanggaran mencapai 1.810 kasus. Begitu media, di Pilkada 2024 yang berlangsung serentak di 545 wilayah anggotanya bisa lebih besar. Hingga tahapan pencalonan saja, lanjut dia, angka dugaan pelanggaran ASN yang dilaporkan sudah ratusan. "Laporan sudah lebih dari kalas tidak salah 400 ya, yang kemudikan sedang ditindaklanjuti," ungkapnya.

Madai kewenangan mengantar jabatan, melakukan mutasi penempatan, hingga memberhentikan ASN dijabatnya. "Bak kewenangan disalahkan, dia melanggar" ujarnya. Akibatnya, ASN di level bawah kerap kali tak kuasa menolak tekanan. Dari sisi regulasi, Abu menilai aturan yang ada sudah cukup. Pekerjaan selanjutnya tinggal bagaimana mengimplementasikan pengawasan dan penindakan jika terbukti ada pelanggaran. Salah satu aspek yang coba digunakan untuk meminimalisir adalah menciptakan atau mutasi berbasis merit system. Dengan begitu, peluang pelepasan menjadi terdistribusi. (far/c19/tg)

TPST Tambakrejo Overload, Warga Ancam Demo

Sidoarjo - HARIAN BANGSA TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Tambakrejo Waru overload, warga Desa Tambaksumur yang tinggal di dekat sana geram. Sebab, sampah membusuk yang menumpuk dapat menimbulkan penyakit.

Jika tidak segera dicelean up, warga pun mengancam menggelar demo besar-besaran ke TPST Tambakrejo Waru dan ke Pemkab Sidoarjo. "Ini tidak bisa dibiarkan. Kasihan kami yang tinggal di dekat TPST Tambakrejo Waru," ujar warga setempat, Sabtu 14 September 2024.

Kepala Desa (Kades) Tambaksumur, H Mas'ud SAG juga mereaksi keluhan warganya. Kades Tambaksumur meminta DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) Sidoarjo segera melakukan clean up TPST Tambakrejo Waru karena membuat resah warga. "Kami meminta agar TPST Tambakrejo Waru segera dicelean up," ujar kades.

Dikatakan, warga Tambaksumur RW 01 dan RW 03 sudah tidak membuang sampah ke TPST Tambakrejo Waru karena sudah lama overload. Warga Tambaksumur akhirnya membuang sampah ke TPST Mekar Sari, Desa Kureksari, Waru. "Pembuangan ke sana atas arahan anggota DLHK Sidoarjo H Warih Andono," jelas kades.

Karena itulah kades mendesak DLHK Sidoarjo segera melakukan clean up TPST Tambakrejo Waru. Tidak hanya itu, kades juga meminta DLHK Sidoarjo mendampingi pengerjaan TPST di Desa Tambaksumur Waru, sehingga warga tidak resah dengan sampah menumpuk di TPST Tambakrejo Waru dan punya TPST sendiri di Desa Tambaksumur.

Kepala DLHK Sidoarjo DR M Bahrul Amig dikonfirmasi terpisah mengatakan, TPST Tambakrejo Waru kurang profesional dalam mengelola sampah. Akibatnya, menimbulkan masalah bagi warga dan masih mempunyai hutang di DLHK Sidoarjo. Ia meminta pengelola TPST itu segera melunasi hutang dan membayar clean up secepatnya.

Abah Amig, panggilan akrab Kepala DLHK Sidoarjo juga meminta agar Kades Tambaksumur segera menindaklanjuti terkait TPS3R agar cepat dibuka. "Dengan begitu, sampah di Tambaksumur segera teratasi dan tidak menimbulkan polemik,"



Bupati Subandi menyerahkan bantuan pangan.

1.384 Keluarga Resiko Stunting Terima Bantuan Pangan

oarjo - HARIAN BANGSA Pemkab Sidoarjo terus berupaya menurunkan angka stunting di Kota a. Diantaranya melalui program bantuan pangan untuk Keluarga Resiko Stunting (KRS).

Kali ini bantuan pangan tersebut disalurkan kepada 1.384 KRS di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Krian, Tarik dan Balongbendo, Selasa (17/9). Setiap KRS memperoleh satu ekor daging ayam dan 10 butir telur ayam.

Penyaluran bantuan pangan ini dipantau langsung oleh Bupati Sidoarjo Subandi. Ia berharap kasus stunting di Kabupaten Sidoarjo terus menurun. Oleh karenanya asupan gizi anak-anak Sidoarjo harus terus mendapatkan perhatian.

Hal itu akan selalu menjadi perhatian pemerintah untuk menyiapkan generasi emas menuju Indonesia yang lebih baik. "Ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak kita, sehingga mereka dapat tumbuh é sehat dan cerdas," tutur Kota Subandi, stating juga masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat desa era perenerus bangsa. Or diharapkan dapat terus tumbuh kembang anak (

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo

13 Sekolah akan Direnovasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo akan menambah jumlah sekolah yang diperbaiki tahun ini. Ada tambahan 13 sekolah yang akan direnovasi.

M Saiful Rohman,

Wartawan Radar Sidoarjo

ARTINYA, total sekolah yang diperbaiki mencapai 46. Saat ini, Dispendikbud Sidoarjo sedang memperbaiki 23 SDN dan 10 SMPN.

Beberapa sekolah yang mendapatkan perbaikan tambahan yakni, SDN Gedang di Kecamatan Porong, SDN Suko 1 di Kecamatan Sidoarjo dan TK Pembina di Kecamatan Sedati.

Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan, Sarana dan Prasarana, Dinas Dispendikbud Sidoarjo, Indar Hidayanti mengatakan, perbaikan tersebut akan didanai melalui APBD Perubahan. Oleh karena itu, proses pelaksana-

naannya baru akan dimulai bulan depan.

Adapun pekerjaannya diperkirakan memakan waktu tiga bulan.

Dengan demikian proses perbaikan diharapkan selesai pada akhir tahun.

"Untuk sekolah yang diperbaiki lewat perubahan anggaran keuangan, pelaksanaan pekerjaan fisiknya dimulai dari Oktober hingga Desember," ucapnya, Selasa (17/9).

● Ke Halaman 10





13 Sekolah...

Saat ini, pihaknya masih dalam tahap mempersiapkan proses pembangunan. Perbaikan yang direncanakan meliputi berbagai item. "Item perbaikannya beragam, ada rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas, pavingisasi, serta

✓ KPU Upayakan Fasilitas Tes Kesehatan Gratis untuk Calon Petugas KPPS

KOTA-Kabupaten Sidoarjo akan menggelar Pilkada serentak 2024. Saat ini KPU Sidoarjo terus melakukan persiapan untuk memastikan pesta demokrasi tersebut berjalan dengan lancar.

Salah satu langkah persiapannya adalah perekrutan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dalam prosesnya calon petugas KPPS wajib untuk melampirkan surat keterangan sehat.

Untuk mempermudah proses tersebut, biasanya KPU Sidoarjo bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo



PELAYANAN: Petugas kesehatan Puskesmas Gedangan saat periksa kesehatan petugas KPPS pada pilleg lalu.

agar calon petugas KPPS dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara

gratis. Namun, hingga saat ini, belum ada

● Ke Halaman 10



KPU Upayakan...

kepastian akan adanya fasilitas tes kesehatan gratis. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Sidoarjo, Danang Abdul Ghani mengatakan, pihaknya belum menerima surat permohonan resmi dari KPU Sidoarjo terkait hal tersebut.

"Mohon maaf, Dinkes Sidoarjo belum mendapatkan surat permohonan dari KPU," ucapnya pada Radar Sidoarjo, Selasa (17/9).

Dia menjelaskan, untuk fasilitas tes

kesehatan gratis, biasanya diperlukan permohonan resmi dari KPU. Kemudian diikuti dengan rapat koordinasi untuk menentukan teknis pelaksanaan, seperti jenis pemeriksaan.

"Normatif ada permohonan dari KPU Sidoarjo, kemudian rapat koordinasi terkait teknis pelaksanaannya, apa saja yang diperiksa kesehatannya, perlu cek laboratorium atau tidak, baru kami buat edaran ke puskesmas," jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sidoarjo, Fauzan Adhim mengonfirmasi,

pihaknya masih dalam tahap komunikasi dengan Dinkes Sidoarjo mengenai fasilitas tes kesehatan.

"Kami dalam tahap komunikasi," terangnya.

Fauzan memastikan, penyediaan fasilitas tes kesehatan gratis bagi calon petugas KPPS masih ia usahakan. "Iya, masih diupayakan," jelasnya.

Dengan perekrutan petugas KPPS yang sudah dimulai, diharapkan adanya kejelasan mengenai fasilitas tes kesehatan agar proses persiapan Pilkada dapat berjalan lancar. (sai/vga)



menetapkan berpotensi kekerasan).

LAN ARU MELI. KAPRINTA



Ali Kusyanto/Bhirawa
hak di Kabupaten Sidoarjo kompak untuk terus menurunkan kasus stunting di wilayah Sidoarjo.

Penguatan Pengasuhan Anak di Sidoarjo

Diharap Bisa Tekan Kasus Stunting

Sidoarjo, Bhirawa

Berbagai cara dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo, agar wilayahnya terbebas atau zero stunting. Salah satu di antaranya, dengan program penguatan pengasuhan anak yaitu Kelas Orang Tua Hebat Modul BKB (Bina Keluarga Balita) Emas. Yang saat ini terus dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo.

Selain pembagian daging ayam dan telur untuk pemenuhan gizi Balita rawan stunting, DP3AKB Kabupaten Sidoarjo,

juga menggandeng kader keluarga di desa dalam mengidentifikasi tanda-tanda awal stunting. "Kami dengan berbagai usaha akan terus komitmen dalam mempercepat penurunan angka stunting," kata Plt Bupati Sidoarjo, Subandi SH, dalam acara internalisasi Pengasuhan Balita Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Melalui Kelas Orang Tua Hebat di Pendopo Delta Wibawa, belum lama ini.

Menurut Subandi, orang tua mempunyai peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak, terutama dalam

upaya mencegah kasus stunting sejak dini. Dengan internalisasi pengasuhan yang baik dan benar, diharapkan para orang tua dapat memahami betapa pentingnya memberikan perhatian khusus pada masa emas pertumbuhan balitanya.

Selain peranan orang tua, juga diharapkan peran dari Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD. Menurut dirinya, kasus stunting bukan hanya masalah kesehatan saja, tetapi juga persoalan masa depan generasi penerus. "Kelas Orang Tua Hebat ini merupakan bagian dari langkah nyata kita untuk

meningkatkan pengetahuan tentang pengasuhan Balita yang benar, agar bisa tumbuh sehat dan cerdas," kata Subandi.

Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, Heni Kristiani SPd MSI, menjelaskan program pengasuhan kepada balita melalui Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) dilakukan itu, memberikan edukasi secara komprehensif kepada para orang tua dalam menjaga kesehatan dan perkembangan balita mereka. "Kami juga menggandeng kader keluarga desa-desa, agar bisa lebih awal dalam mengidentifikasi tanda-tanda awal stunting," kata Heni. [Kus.ca]

Dina Distribusi Air Dinerbaiki

HARIAN
Bhirawa
Bina Rakyat Bina Negeri

Demo Tuntut Mundur Plt Kepala SDN Juwetkenongo

Belum Terealisasi dan Sudah Dibatalkan

SIDOARJO - Buntut dari penolakan kebijakan Plt Kepala SD Negeri Juwetkenongo Kecamatan Porong yang sudah dibatalkan, puluhan wali murid SD Negeri Juwetkenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo menggelar aksi demonstrasi di halaman sekolah Selasa (17/9/24).

Mereka menuntut Plt Kepala sekolah untuk mundur. Namun Plt Kepala Sekolah SD Negeri Juwetkenongo tidak ada ditempat dikarenakan yang bersangkutan juga Kepala SD Negeri Kesambi bersamaan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H di Sekolah Dasar Negeri Kesambi.

Wali murid yang mayoritas emak-emak tersebut datang ke sekolah sejak pagi sekitar pukul 06.30 WIB. Mereka sempat memblokade gerbang sekolah, dan meliburkan siswa-siswi yang akan masuk sekolah.

Di lokasi koordinator aksi, David mengatakan kita aksi damai demi kebaikan anak kita yang ada di SD Negeri Juwetkenongo terkait kebijakan infak Jumat legi, tabung wajib, dan sumbangan bentuk uang.

Kebijakan Kepala Sekolah memang belum terealisasi, soalnya saya jegal karena tidak cocok dan tidak ada perundingan antara wali murid, pas paguyuban serta komite tidak ada.

"Tuntutan kami menolak kebijakan kepala sekolah dan diganti kepala sekolah yang baru, karena kita merasa memiliki, aksi ini puncak dari kemarahan wali murid," pungkask David koordinator aksi.

Sementara itu, Kepala Bidang Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidoarjo Neti Lastingsih mengatakan, pihak Dinas Pendidikan Sidoarjo telah mendapatkan laporan terkait apa yang telah dilakukan oleh Plt kepala sekolah. Sejak awal yang sudah dilalui melalui dari komite, apa yang sudah bapak dan ibu sampaikan melalui surat dan kami terima itu sudah kita tidak lanjut.

"Tadi kami tidak tinggal diam, sudah kami proses dan tindak lanjut. Saya sampaikan apa yang ditulis oleh bapak ibu itu saya pastikan tidak akan dilaksanakan. Jadi sekolah sudah mendengar kan



Aksi damai Demontrasi tuntutan emak-emak wali murid SD Negeri Juwetkenongo Selasa (17/9/24).

arahan dari kami sehingga bapak ibu tidak usah khawatir. Saya sampaikan sekolah ini adalah milik kita dan milik anak-anak kita, jangan sampai apa yang dilakukan bapak ibu hari ini merugikan anak-anak kita semuanya," ungkap Neti.

Mari kita bicara baik-baik, kami sudah mengajak bicara baik-baik pada hari Kamis namun tidak ada yang hadir. Padahal akan kami sampaikan namun tidak ada yang hadir. Dan kedua kami sudah menerima surat pengunduran diri dari kepala sekolah, dan ini sudah di proses. Sehingga kami harap bapak

ibu dapat bersabar, karena semua ada prosedurnya karena kami adalah ASN.

"Secara kedisiplinan bahwa Kepala Sekolah SD Negeri Juwetkenongo mulai hari Senin (16/9/24) sudah menyampaikan pengunduran diri menjadi kepala sekolah," imbuh Neti.

Harapan kami bila ada permasalahan di lingkungan sekolah mari kita bicarakan dengan baik, dan jangan seperti ini. Karena kaisihan anak-anak kita yang maunya sekolah tidak jadi sekolah. Dan jangan sampai apa yang kita lakukan

dapat merugikan anak-anak kita yang tidak tahu apa-apa.

"Kami mengharapkan mulai besok siswa-siswi harus kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kalau terus diliburkan seperti hari sangat merugikan siswa-siswi," pungkask Neti.

Terpisah, sementara Sayyidatul Uyun, S.Pd, M.Pd Plt. Kepala Sekolah saat di konfirmasi tidak ada di lokasi dikarenakan sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di SD Negeri Kesambi mengatakan, sebelumnya sudah saya sampaikan kepada walimurid dengan musyawarah mufakat, karena hal itu tidak disetujui, maka tidak saya lakukan dan itu sudah tertulis dalam berita acara.

"Namun bila mana dengan adanya masalah ini wali murid tidak berkenan saya menjadi Plt SDN Juwetkenongo maka saya sudah menulis kan surat pengunduran diri, terang Bu Uyun biasa disapa.

Harapan saya ke depannya ada kolaborasi bagus sekolah dan wali murid. "Bila ada permasalahan di lingkungan sekolah yang tidak dipikati bisa bertabayun dulu. Dan harus bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga tidak ujuk-ujuk seper ti itu, yang dapat mengakibatkan terganggunya aktifitas belajar mengajar anak-anak," pungkasknya. • Loe

DUTA
MUSKABANG



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sembako Tak Layak Konsumsi

GRESIK- Penyaluran beras CSR dari PT Smelting kepada warga Desa Roomo, Kecamatan Manyar menjadi polemik. Karena beras yang disalurkan ke warga diduga kurang layak konsumsi.

Untuk itu, pihak pemerintah Kecamatan Manyar memediasi antara Pemerintah Desa Romoo dengan warga, RT, RW dan perwakilan BPD hadir di Kantor Kecamatan Manyar, kemarin.

Camat Manyar Hendriawan Susilo kepada awak media menyampaikan, polemik penyaluran beras dari CSR PT Smelting tersebut timbul karena beras yang disalurkan ke warga diduga kurang layak konsumsi.

“Karena itu, kami sudah instruksikan kepada pemerintah desa agar beras yang sudah disalurkan diganti dengan beras lebih layak sesuai dengan nilai dan spek dari pihak pemberi CSR yang disalurkan,” tutur dia.

Pihaknya juga meminta agar Pemdes Romoo menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat secara terbuka.

“Kami juga akan menghimbau kepada pihak swasta atau perusahaan yang memberikan CSR agar kedepannya berupa barang,” imbuh dia.

Sedangkan Kepala Desa Roomo Taqwa Zamudin berjanji pihaknya memastikan akan mengganti beras tersebut kepada

masyarakat.

Dia menjelaskan, PT Smelting memang memberikan CSR kepada Pemerintah Desa berupa uang sebesar Rp 1 miliar. Sebagian sebagian digunakan untuk memberikan bantuan sembako kepada masyarakat.

“Yang melaksanakan dan membeli (berasnya) tim pelaksana kegiatan dan perangkat kita. Pasti kita ganti semua,” katanya.

Perlu diketahui, total beras yang disalurkan 1.180 paket, per paket 10 kilogram. ● Pii

DUTA

an sampai apa yang kita lakukan

Perwakilan Ormas, Pedagang dan LSM Datangi Kadishub

SIDOARJO - Beberapa orang dari perwakilan pedagang, LSM, Ormas dan, media mendatangi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo guna menemui Kadishub Benny Airlangga Selasa (17/9/24) untuk menanyakan dan mencari solusi atas adanya dugaan iuran pedagang dan pembakaran salah satu lapak pedagang di lokasi Terminal Porong.

Sandi salah seorang yang menyampaikan keluhan terkait pembakaran lapak pedagang ayam potong mengatakan, pembakaran lapak tersebut apa niatnya, sampai orang kami tidak jualan, padahal disitu ada posko LSM Seven Gab. “Dan kami ingin tahu paguyuban PKL didalam terminal siapa pengelola paguyuban,” ujar Sandi

Bahkan sempat ada intimidasi dari oknum yang diketahui bernama Pak Yono, Pak Sutris Pak Gareng dan, mengintimidasi pedagang kami. Dan disana ada sebuah iuran (retribusi) kalau terarah, arahnya kemana? Peruntukannya dan siapa pengelola uang ini yang besarnya

terkait pedagang dan masalah lapak yang dibakar dirinya tidak mengetahui, karena tidak ada berita (info) masuk.

“Intinya butuh kejelasan siapa sih yang menempati di terminal Porong, khususnya PKL, yang jelas kami ini wilayahnya terminal jadi bukan pedagang pasar. Jadi kami hanya wilayah terminal untuk memfasilitasi pengunjung terminal itu.1,” ujar Benny.

Masih kata Benny, di wilayah terminal memang ada sekian banyak PKL dan mungkin menuakan satu atau beberapa orang atau membuat perkumpulan atau dinamakan Paguyuban PKL terminal Porong.

“Yang jelas kami diluar itu dan tidak ada retribusi tidak ada bayaran, karena ada undang-undang baru yang harus sewa (yang ada sewa). Sewa ini kami masih transisi menggodok aturan selanjutnya,” jelas Benny. Harapannya terminal Porong ini terminal besar, ada pengaturan untuk fasilitas yang terminal itu sendiri dan pasar (PKL) itu sendiri.

“Jadi kebetulan kami masih ada

Sabtu Rp 12.000 dan Minggu Rp 5000 dan Selasa Rp 12.000..

“Sandi(Andi) menambahkan, harapan saya mengawal suara teman -teman agar tidak terjadi miss karena hubungan baik dengan Jenengan selaku Kadishub,”pungkasnya.

Benny Airlangga Yogaswara, SH.,MM dikonfirmasi Duta Masyarakat Selasa (17/9/24) diruang kerjanya mengatakan,

lahan di sana dengan harapan bisa ditempatkan di sana dan masih mbuka mungkin ada investor yang mau ,dengan jumlah PKL yang ada dan harapan kami tidak nambah lagi karena tidak cukup dan secepatnya dalam Minggu ini kami agendakan pertemuan dengan PKL dan paguyuban juga teman -teman LSM,media dan Ormas untuk mencari solusi masalah ini,”pungkas Benny. ● Loe



LOETFI/DUTA

Perwakilan pedagang dan beberapa anggota LSM dan Ormas saat ditemui Kadishub Kab.Sidoarjo Benny Airlangga diruang kerjanya Selasa (17/9/24)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TPST Tambakrejo Overload, Warga Ancam Demo

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Tambakrejo Waru overload, warga Desa Tambaksumur yang tinggal di dekat sana geram. Sebab, sampah membusuk yang menumpuk dapat menimbulkan penyakit.

Jika tidak segera diclean up, warga pun mengancam menggelar demo besar-besaran ke TPST Tambakrejo Waru dan ke Pemkab Sidoarjo. "Ini tidak bisa dibiarkan. Kasihan kami yang tinggal di dekat TPST Tambakrejo Waru," ujar warga setempat, Sabtu 14 September 2024.

Kepala Desa (Kades) Tambaksumur, H Mas'ud SAg juga mereaksi keluhan warganya. Kades Tambaksumur meminta DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) Sidoarjo segera melakukan clean up TPST Tambakrejo Waru karena membuat resah warga. "Kami meminta agar TPST Tambakrejo Waru segera diclean up," ujar kades.

Dikatakan, warga Tambaksumur RW 01 dan RW 03 sudah

tidak membuang sampah ke TPST Tambakrejo Waru karena sudah lama overload. Warga Tambaksumur akhirnya membuang sampah ke TPST Mekar Sari, Desa Kureksari, Waru. "Pembuangan ke sana atas arahan anggota DPRD Sidoarjo H Warih Andono," jelas kades.

Karena itulah kades mendesak DLHK Sidoarjo segera melakukan clean up TPST Tambakrejo Waru. Tidak hanya itu, kades juga meminta DLHK Sidoarjo mendampingi pengerjaan TPST di Desa Tambaksumur Waru, sehingga warga tidak resah dengan sampah menumpuk di TPST Tambakrejo Waru dan punya TPST sendiri di Desa Tambaksumur.

Kepala DLHK Sidoarjo DR M Bahrul Amig dikonfirmasi terpisah mengatakan, TPST Tambakrejo Waru kurang profesional dalam mengelola sampah. Akibatnya, menimbulkan masalah bagi warga dan masih mempunyai hutang di DLHK Sidoarjo. Ia meminta pengelola TPST itu segera melunasi hutang dan membayar clean up secepatnya.

Abah Amig, panggilan akrab Kepala DLHK Sidoarjo juga meminta agar Kades Tambaksumur segera menindaklanjuti terkait TPS3R agar cepat dibuka. "Dengan begitu, sampah di Tambaksumur segera teratasi dan tidak menimbulkan polemik warga," tandasnya. (md/rus)

HARIAN
BANGSA
Koran Minggu, Jember



Plt Bupati Subandi menyerahkan bantuan pangan.

1.384 Keluarga Resiko Stunting Terima Bantuan Pangan

Sidoarjo - HARIAN BANGSA Pemkab Sidoarjo terus berupaya menurunkan angka stunting di Kota Delta. Diantaranya melalui program bantuan pangan untuk Keluarga Resiko Stunting (KRS).

Kali ini bantuan pangan tersebut disalurkan kepada 1.384 KRS di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Krian, Tarik dan Balongbendo, Selasa (17/9). Setiap KRS memperoleh satu ekor daging ayam dan 10 butir telur ayam.

Penyaluran bantuan pangan itu dipantau langsung oleh Plt Bupati Sidoarjo Subandi. Ia berharap kasus stunting di Kabupaten Sidoarjo terus menurun. Oleh karenanya asupan gizi anak-anak Sidoarjo harus terus mendapatkan perhatian.

Hal itu akan selalu menjadi perhatian pemerintah untuk menyiapkan generasi emas menuju Indonesia yang lebih baik. "Ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi Teks: anak-anak kita, sehingga

mereka dapat tumbuh dengan sehat dan cerdas," cetusnya. Kata Subandi, stunting bukan hanya masalah kesehatan. Tetapi juga persoalan masa depan generasi penerus bangsa. Orang tua diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak. (sta/rus)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pelanggaran Netralitas ASN Sudah 400 Kasus

Bawaslu Prediksi Lebih Masif daripada Pilpres

JAKARTA – Menjelang penetapan pasangan calon, pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN) diintensifikan. Sebab, mobilisasi ASN menjadi salah satu potensi pelanggaran yang masif dalam Pilkada 2024.

Kemarin Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri), serta Badan Kepegawaian Negara mengumpulkan jajaran kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah se-Indo-



JAGA INTEGRITAS: Komisioner Bawaslu Puadi (tengah) di hadapan jajaran kepala daerah dan perwakilan pemerintah daerah di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, kemarin (17/9).

nesia. Selain deklarasi, dalam kesempatan itu disampaikan pengarahannya secara langsung.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, sesuai penetapan pasangan calon, akrobat politik diperkirakan meningkat. Termasuk potensi memobilisasi ASN untuk mengais dukungan.

"Dalam indeks kerawanan pilkada yang dikeluarkan Bawaslu, isu netralitas ASN adalah isu ketiga yang terawakan," ujarnya.

Bagja menekankan, kerawanan mobilisasi ASN pada pilkada jauh lebih tinggi dibandingkan pilpres. Sebab, lokus pilkada lebih dekat

dengan birokrasi daerah. Di sisi lain, petahana punya kekuatan untuk menggerakkan jajaran di bawahnya.

Mengacu data Bawaslu, pada Pilpres 2024, pelanggaran netralitas ASN tidak sampai seribu kasus. Padahal, pada Pilkada 2020 yang berlangsung di 170 daerah,

pelanggaran mencapai 1.010 kasus. Bagja menduga, di Pilkada 2024 yang berlangsung serentak di 545 wilayah, angkanya bisa lebih besar.

Hingga tahapan pencalonan saja, lanjut dia, angka dugaan pelanggaran ASN yang dilaporkan sudah ratusan. "Laporan sudah lebih dari kalau tidak salah 400 ya, yang kemudian sedang ditindaklanjuti," ungkapnya.

Pt Deputi SDM Aparatur Kemen PAN-RB Aba Subagja menambahkan, kans mobilisasi ASN, khususnya oleh petahana, cukup besar. Mengingat, petahana punya kekuatan untuk menekan birokrasi. Apalagi, ada tiga kewenangan kepala daerah yang bisa menentukan nasib birokrat di daerah.

Mulai kewenangan mengangkat jabatan, melakukan mutasi penempatan, hingga memberhentikan ASN dari jabatan. "Jika kewenangan disalahgunakan, dia melanggar," ujarnya.

Akibatnya, ASN di level bawah kerap kali tak kuasa menolak tekanan. Dari sisi regulasi, Aba menilai aturan yang ada sudah cukup. Pekerjaan selanjutnya tinggal bagaimana mengimplementasikan pengawasan dan penindakannya jika terbukti ada pelanggaran.

Salah satu aspek yang coba digunakan untuk meminimalkan itu adalah menciptakan sistem pengangkatan atau mutasi berbasis *merit system*. Dengan begitu, peluang petahana memanfa-

atkan kewenangan memutasikan ASN bisa diminimalkan. "Sistem karier harus dibangun secara terbuka," imbuhnya.

Tenaga Ahli Mendagri Suhajar Diantoro mengakui, baik ASN maupun kepala daerah, tidak semuanya taat pada aturan. Itu terkonfirmasi dari data dugaan pelanggaran yang dimiliki Bawaslu. "Kita harus terus membina pegawai, tidak boleh lelah," ujarnya.

Mendagri, lanjut dia, dalam rapat supervisi sudah meminta jajaran kepala daerah untuk tidak bermain-main di pilkada. Dia memastikan, Kemendagri akan mendukung penuh Bawaslu dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam menjalankan tugas pengawasan dan penindakan. (far/c19/ttg)

Jawa Pos

Plt. Bupati Sidoarjo : Tumbuhkan Ekonomi dan Seni Budaya Lewat Pasar Rakyat Sidobudoyo

September 17, 2024 - 8 Views



Sidoarjo – Plt. Bupati Sidoarjo, Subandi mengapresiasi pasar rakyat Sidobudoyo oleh Lembaga Seni Budaya Muslim Nahdlatul Ulama (Lesbumi NU) Sidoarjo. Pasalnya, kegiatan ini mampu menggeliatkan ekonomi serta menumbuhkan kembali seni budaya yang ada di Sidoarjo.

“Sebanyak 100 UMKM yang tergabung dalam acara ini tentunya dapat menumbuhkan kembali perekonomian di Kabupaten Sidoarjo, banyak masyarakat yang datang dan melakukan jual beli, tentunya perputaran uang akan semakin aktif dari rakyat Sidoarjo dan untuk rakyat Sidoarjo sendiri,” katanya saat membuka acara Pasar Rakyat Sidobudoyo di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo pada Senin malam (16/9).

Menurut Subandi, selain perekonomian yang juga tumbuh, berbagai pertunjukan seni budaya dan perlombaan dalam acara ini juga menjadi daya tarik sendiri, karena masyarakat akan lebih mengenal kembali seni budaya yang ada di Sidoarjo.

“Kegiatan ini juga mengenalkan masyarakat akan budaya Islam yang masih kental di Sidoarjo seperti shalawat, serta perlombaan gamelan Jawa yang ada,” ucapnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ia juga berharap kegiatan seperti ini dilakukan rutin tiap tahun agar seni budaya islam di Sidoarjo tetap terjaga dan tetap dikenal oleh masyarakat baik dewasa maupun remaja seiring perkembangan teknologi yang kian pesat.

"Tetap jaga seni dan budaya islam yang masih kental di Sidoarjo dengan cara dikemas dengan acara menarik seperti ini," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Lesbumi Sidoarjo, Ahmad Anis Fahmi mengatakan kegiatan pasar rakyat Sidobudoyo ini digelar bertepatan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw, sehingga berbagai acara seni budaya islam akan dimunculkan dalam kegiatan ini.

"Pada zaman dahulu, peringatan Maulid Nabi di alun-alun Sidoarjo ini selalu dinantikan oleh masyarakat. Kami mengajak masyarakat untuk turut serta bershalawat dan lomba shalawat gemelan Jawa juga ada di pagelaran kegiatan ini, yang mana gamelan Jawa ini merupakan alat syiar agama para wali songo," jelasnya.

Tentunya kata dia, masyarakat juga dapat menikmati sajian dari UMKM di Sidoarjo mulai dari makanan, minuman, hingga kerajinan khas Sidoarjo yang diperjualbelikan.

"Selain perekonomian tumbuh, seni budaya juga ikut kembali dikenal oleh masyarakat, itulah tujuan acara ini diselenggarakan," tutupnya. (GUS)



Pimpin Apel ASN, Plt. Bupati Sidoarjo Pesan Jaga Integritas dan Kedisiplinan

September 17, 2024 - 8 Views





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sidoarjo – Plt. Bupati Sidoarjo Subandi memimpin apel Aparatur Sipil Negara yang berlangsung pada hari Senin (17/9/2024) di Mall Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo.

Dalam sambutannya, Subandi mengajak seluruh ASN di Kabupaten Sidoarjo untuk menjadi ASN yang menjalankan tugas-tugasnya dengan berpegang teguh pada nilai-nilai integritas dan kedisiplinan.

“Sebagai ASN kita wajib memegang teguh integritas dan kedisiplinan. Dengan integritas maka kita akan mampu menjadi pelayan masyarakat terbaik, jujur, transparan, dan akuntabel. Sedangkan dengan disiplin maka semua target akan dapat kita capai bersama sesuai harapan,” pesannya.

Ia menambahkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga telah memberikan tunjangan performa atau TPP untuk ASN yang berprestasi serta mendorong peningkatan kinerja ASN.

“Tunjangan yang saat berjalan untuk kesejahteraan ASN adalah pengurangan cuti dari sebelumnya 4 persen menjadi 3 persen. Pengurangan sertifikat PBJ (Pengadaan Barang Jasa) hanya berlaku untuk pejabat eselon dan pejabat struktural yaitu dari 35 persen menjadi 15 persen,” katanya.

“Hak-hak inilah yang akan menunjang peningkatan kinerja dan kesejahteraan ASN di Sidoarjo,” tambahnya.

Subandi juga berpesan ASN Sidoarjo terus berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan baik, berjuang bersama untuk pembangunan Sidoarjo, fokus pada kinerja, meningkatkan kompetensi, bekerja bersama untuk dedikasi sebagai pengabdian Negara.

“Dengan upaya ini, saya berharap ASN Sidoarjo berkomitmen bersama untuk pembangunan Sidoarjo yang lebih baik dan maju,” pesannya.

Terakhir, ia juga meminta agar ASN tetap jaga profesionalitas dan netralitas saat pemilihan kepala daerah. Dan jangan sampai ada perpecahan karena Pilkada.

“Sebagai ASN harus jaga profesionalitas dan netralitas. Saya juga minta kepada BKD sebagai pondasi ASN di Sidoarjo agar menjaga sistem merit agar dibangun dengan baik agar tidak ada kecemburuan, serta tetap terjaga keharmonisan dan kebersamaan antar ASN,” tutupnya. (GUS)



Seluruh Kyai dan Tokoh Masyarakat Se Kabupaten Sidoarjo Memberi Dukungan Kepada Amir Aslichin dan Edy Widodo (SAE)

Redaksi
September 17, 2024





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sidoarjo – Siarpos.com

DPC PKB Sidoarjo terus mendekati komunitas kultural Nahdlatul Ulama (NU) untuk mendukung kemenangan pasangan Achmad Amir Aslichin (Mas lin)-Edy Widodo (SAE) di Pilbup Sidoarjo.

Seperti yang dilakukan pada hari ini, Selasa (17/9/2024), DPC PKB Sidoarjo mengadakan silaturahmi dan musyawarah dengan ulama serta tokoh masyarakat di Pondok Pesantren Al-Amanah, Junwangi, Krian.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Cabup Mas lin, bersama beberapa kiai serta tokoh masyarakat Nahdliyin. Anggota Fraksi PKB dan Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Anik Maslachah, juga tampak hadir dalam pertemuan ini.

Ketua DPC PKB Sidoarjo, Abdillah Nasih, menyampaikan bahwa dari hasil pertemuan dengan para tokoh dan kiai akan dibentuk

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Riset dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

tim sembilan untuk mengawal kemenangan pasangan SAE dalam Pilkada 2024.



“Dari pertemuan kali ini, akan kita tindak lanjuti, kita akan sowan untuk merumuskan langkah taktis dan strategis, termasuk rencana pembentukan tim sembilan,” katanya.

Tim sembilan ini nanti akan disinkronkan dengan tim pemenangan pasangan SAE. Sehingga ruang geraknya bisa sinergis dengan jaringan struktur dan kultural.

“Kita kuatkan dulu jaringan kultural kita dari jamaah NU dan para masyaikh yang ada di Sidoarjo,” ungkapnya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Abdillah Nasih yang saat ini menjabat Ketua DPRD Sidoarjo, mengatakan, bahwa acara silaturahmi ini murni atas inisiatif para kiai untuk membangun komitmen supaya Kabupaten Sidoarjo tetap PKB "Ijo Royo-royo".

"Saya ucapkan terimakasih yang luar biasa atas dukungan moril dan do'a-do'a dari para kiai untuk kemenangan pasangan SAE," ujarnya.

Dia menegaskan, Partai Kebangkitan Bangsa akan selalu berkhidmat pada NU dan jam'iyah Nahdlatul Ulama di Sidoarjo.

Dukungan dari para kiai ini tidak hanya melalui doa saja, melainkan juga jaringan dan basis warga nahdliyin di Kota Delta.

"Dukungan dari para kiai ini juga secara dzahir dan jaringan santri untuk kemenangan SAE di Pilkada 2024," pungkasnya. (Cak Sokran)



Pimpinan sementara DPRD Sidoarjo, (dari kiri) Abdillah Nasih dan Suyarno memimpin sidang paripurna penetapan usulan parpol untuk personel Ketua dan Wakil Ketua Dewan serta pengurus Fraksi.

DNN, SIDOARJO – Forum Sidang Paripurna DPRD Sidoarjo yang digelar Rabu (11/09/2024) menerima nama-nama yang diusulkan semua parpol parlementer untuk mengisi posisi Pimpinan Dewan dan pengurus setiap fraksi di masa bakti 2024-2029.

Diantaranya Abdillah Nasih yang ditunjuk PKB menjadi Ketua DPRD Sidoarjo. Sedangkan untuk posisi Ketua Fraksi diserahkan pada Dhamroni Chudlori yang didukung Achmad Muzayyin sebagai sekretaris dan Ainun Jariyah sebagai bendahara.

Lalu Partai Gerindra masih percaya pada Kayan untuk tetap duduk di kursi Wakil Ketua DPRD. Posisi Ketua Fraksi diserahkan pada pendatang baru, Muzayin Syafrial yang dibantu Supriyono sebagai Sekretaris fraksi.

Selanjutnya Warih Andono mendapatkan mandat dari induk organisasinya untuk menjadi Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Golkar. Sedangkan orang nomer satu di jajaran fraksi tetap digenggam HM. Nizar. Kinerja politisi senior asal Dapil Sidoarjo 4 itu disokong sepenuhnya oleh Wahyu Lumaksono sebagai Wakil Ketua dan Adiel Muhammad Kananta sebagai Sekretaris.

Legislator dari Kecamatan Krian lainnya, Bangun Winarso juga menduduki jabatan sebagai Ketua Fraksi PAN. Posisi Wakil Ketua diisi Emir Firdaus lalu Rizal Fuadi sebagai Sekretaris dan Roki Wardoyo sebagai Bendahara.

Berikutnya untuk Fraksi PKS yang menggandeng PPP dipimpin oleh Afdal Muhammad Ihsan. Posisi Wakil Ketua ditempati Fitrotin Hasanah dan Deny Haryanto sebagai Sekretaris. Sedangkan Vike Widya Asroni anggota fraksi.

Sementara itu di Fraksi Nasdem-Demokrat, menempatkan politisi muda, M. Zakaria Dimas sebagai Ketua yang didukung Zahlul Yussar sebagai Wakil Ketua dan legislator senior, Agil Efendi sebagai Sekretaris fraksi.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Yang terakhir, Sudjalil 'naik pangkat' menjadi Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo di masa bakti lima tahun ke depan. Politisi gaek yang juga berangkat dari Dapil Sidoarjo 4 itu akan didampingi kader banteng senior, Choirul Hidayat sebagai Wakil Ketua dan Kasipah sebagai Sekretaris.

Sayangnya, sampai digelar forum Sidang paripurna tersebut, parpol berlogo banteng moncong putih tersebut belum menunjuk nama legislatornya untuk posisi wakil ketua DPRD Sidoarjo. Tentang hal itu, Bendahara DPC PDI Perjuangan Sidoarjo, Suyarno yang ditemui sesuai rapat paripurna itu mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan pimpinan pusat.

"Memang belum ada perintah dari DPP. Bukan hanya Sidoarjo, tapi seluruh DPRD di Indonesia juga belum ada. Baik yang ada di level propinsi maupun kabupaten dan kota. Ditunggu saja dulu," ujar Suyarno yang saat ini menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Sementara DPRD Sidoarjo itu.

Bahkan politisi asal Prambon tersebut juga belum bisa memberikan gambaran waktu turunnya surat keputusan DPP PDI Perjuangan terkait penugasan kader yang akan menduduki posisi strategis itu. "Yang bisa memastikan ya hanya Bu Mega (Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan-red). Karena itu memang kewenangan beliau," tandas legislator dua periode itu.



Abdillah Nasih memberikan keterangan pers usai memimpin Sidang Paripurna DPRD Sidoarjo.

Mengenai hal itu, Ketua Sementara DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih mengaku tidak terlalu risau. Karena masih ada cukup waktu bagi pihaknya untuk menyusulkan nama legislator. Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Riset dan Humas Sekretaris DPRD Sidoarjo

"Setelah susunan pimpinan DPRD dan fraksi-fraksi ditetapkan hari ini, kami akan ajukan ke Pemprop Jatim untuk mendapatkan pengesahan. Biasanya prosesnya butuh waktu sekitar dua minggu dihitung sejak saat ini. Jadi masih ada banyak waktu," ujar politisi yang berpenampilan kalem itu.

